



BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal merupakan salah satu unsur pelaksana dalam Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.

Pada awal dasar pembentukan Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, an berdasarkan Keputusan Bupati No. 89 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Sebagai konsekuensinya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan No./ 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dengan Peraturan Daerah ini, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal mengalami perubahan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

I. TUGAS POKOK

Demi lancarnya dan terkoordinasinya tugas-tugas yang ada pada Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok yang dapat disimpulkan yaitu *“Melaksanakan Penyusunan Pedoman Petunjuk Teknis, Pengendalian, Pembinaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Perekonomian, serta Menyelenggarakan dan Mengkoordinir Pengumpulan dan Pengelolaan Data, Penyusunan Rencana dan Program Kebijaksanaan di Bidang Penanaman Modal Daerah Kabupaten Malinau.”*

Dari kesimpulan tugas pokok pada Bagian Perekonomian dan Penanaman modal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengendalian, pembinaan administrasi pelaksanaan pembangunan dan perekonomian daerah.
2. Menyelenggarakan dan mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data.
3. Penyusunan rencana dan program kebijakan di bidang penanaman modal daerah di Kabupaten.



Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal memiliki sub bagian yang terdiri atas :

1. **Sub bagian sarana dan prasarana perekonomian** mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan, melaksanakan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sarana dan prasarana peningkatan dibidang perekonomian serta pembinaan produksi pertanian, peternakan, perkebunan, industri dan transportasi.

2. **Sub bagian penanaman modal** mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, melaksanakan pengkajian, penelitian potensi penanaman modal di daerah secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan dan daftar skala prioritas penanaman modal dan perijinan serta promosi penanaman modal.
- b. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal yang berlokasi di wilayah Kabupaten Malinau.

3 **Sub bagian subsidi** mempunyai tugas :

Melaksanakan kebijakan pengendalian pembangunan, ketahanan pangan, transportasi, dan harga-harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan dan pedalaman.

II. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok secara keseluruhan tersebut, Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan petunjuk teknis pembinaan perekonomian dan pembangunan daerah serta menyelenggarakan dan mengkoordinir pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program kebijaksanaan dibidang penanaman modal kabupaten.
- Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang peningkatan produksi pertanian, industri, pertambangan dan energi, pariwisata, koperasi, perusahaan dan perbankan daerah dan transportasi serta mengadakan koordinasi pembinaan evaluasi pelaksanaan tugas penanaman modal.

C. STRUKTUR ORGANISASI



Struktur Organisasi Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau terdiri dari 1 (satu) Kepala Bagian dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, serta unsur staf.

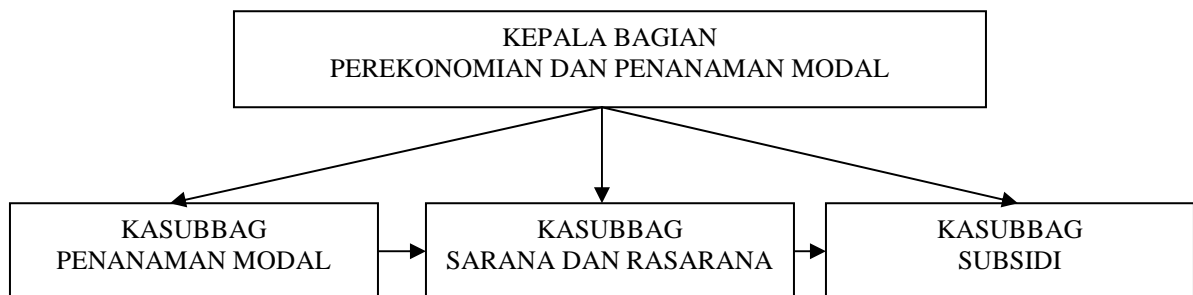
Kelompok jabatan struktural dan eselonering pada Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagaimana dikemukakan dalam tabel 1 berikut :

Tabel. 1

JABATAN STRUKTURAL DAN ESSELONERING PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PENANAMAN MODAL SETKAB MALIANU

| NO | NAMA JABATAN STUKTURAL | ESSELONERING |
|----|--|--------------|
| 1. | Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal | III a |
| 2. | Kasubbag. Penanaman Modal | IV a |
| 3. | Kasubbag. Sarana dan Prasarana | IV a |
| 4. | Kasubbag. Subsidi | IV a |

STUKTUR ORGANISASI BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PENANAMAN MODAL SETKAB. MALINAU



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia aparatur sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penanaman moda, secara kuantitas dan kualitas sudah cukup memadai dengan jumlah personil Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setkab. Malinau 19 (Sembilan belas) orang Pegawai Negeri Sipil.

Pendidikan formal terdiri dari : 3 (tiga) orang Strata Dua (S2), 5 (lima) Orang Strata Satu (S1), 4 (empat) orang Sarjana Muda, dan 7 (tujuh) orang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).



Untuk lebih jelasnya tentang jumlah kepangkatan dan tingkat pendidikan aparatur Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setkab. Malinau sebagaimana dikemukakan pada Tabel .2 sebagai berikut :

Tabel. 2

JUMLAH, KEPANGKATAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN APARATUR BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PENANAMAN MODAL SETKAB MALINAU

TAHUN 2013

| NO | NAMA | PANGKAT/GOL | PENDIDIKAN | JABATAN |
|-----|-----------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|
| 1. | Tirusel STP, SE, M.Si | Pembina / IV a | Strata 2 | Kepala Bagian |
| 2. | Yansen, SE, M.Si | Penata / III c | Strata 2 | Kasubbag. Subsidi |
| 3. | Yusia, SE | Penata / III c | Strata 2 | Kasubbag. Penanaman Modal |
| 4. | Martha Ramba, S. Sos | Penata / III c | Strata 1 | Kasubbag. Sarana dan Prasarana |
| 5. | Saparyani, SE | Penata Muda / III a | Strata 1 | Staf |
| 6. | Adriana, SE | Penata Muda / III a | Strata 1 | Staf |
| 7. | Elia Ding, S. Sos | Penata Muda / III a | Strata 1 | Staf |
| 8. | Markus, S.Sos | Penata Muda / III a | Strata 1 | Staf |
| 9. | Mulyanto, Amd | Pengatur/ Iic | D3 | Staf |
| 10. | Melson, Amd | Pengatur/ Iic | D3 | Staf |
| 11. | Jumadi, A.Md | Pengatur/ Iic | D3 | Staf |
| 12. | Sri Murni Purba, A.md | Pengatur/ Iic | D3 | Staf |
| 13. | Melati Amat | Pengatur Muda TK. I / II b | SLTA | Staf |
| 14. | Susi Yanti | Pengatur Muda TK. I / II b | SLTA | Staf |
| 15. | Darham | Pengatur Muda TK. I / II b | SLTA | Staf |
| 16. | Heldy Fitrianto | Pengatur Muda TK. I / II b | SLTA | Staf |
| 17. | Melati Amat | Pengatur Muda TK. I / II b | SLTA | Staf |
| 18. | Adi Rawansyah | Pengatur Muda TK. I / II | SLTA | Staf |
| 19. | Harlian | Pengatur Muda TK. I / II b | SLTA | Staf |
| | | | | |



E. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setkab Malinau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas, inventaris dan fasilitas lainnya yang terdiri dari :

1. Ruang Kepala Bagian : 3 x 4 m²
2. Ruang Kasubbag dan staf : 6 x 12 m²

Selain ruang kerja tersebut diatas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal juga didukung sarana dan prasarana pendukung yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Malinau yang terdiri dari :

| No | Sarana penunjang | Jumlah | Kondisi | |
|----|------------------|--------|---------|---------|
| | | | Baik | Rusak |
| 1 | Mobil | 1 | Baik | 2 Rusak |
| 2 | Motor | 5 | Baik | |
| 3 | Komputer | 6 | Baik | |
| 4 | Pesawat Tlp | 2 | Baik | |

F. KEADAAN UMUM WILAYAH

1. Letak geografis

Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999. Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten strategis di bagian utara Propinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten berada di Malinau. Wilayah Kabupaten Malinau berada di daerah tropis dengan posisi geografis 1° 21' 36" - 4° 10' 55" LU dan 114° 35' 22" - 116° 50' 55" BT.

Kondisi alam Kabupaten Malinau didominasi oleh wilayah daratan, yang luasnya mencapai sekitar 42.620 KM². Secara Administratif Kabupaten Malinau memiliki Batas wilayah sebagai berikut :

- ☒ Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Nunukan
- ☒ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat
- ☒ Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Bulungan
- ☒ Sebelah Barat : berbatasan dengan Malaysia Timur (Serawak)



2. Topografi dan Fisiografi

Keadaan topografi Kabupaten Malinau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Selanjutnya juga dapat dibedakan atas kawasan perbukitan terjal di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang bagian tengah, dan daratan bergelombang landai di bagian timur. Perbukitan terjal di sebelah utara bagian barat merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m – 3.000 m di atas permukaan laut. Keadaan perbukitan lereng ini memiliki sudut lereng lebih dari 30% dan untuk daerah yang merupakan dataran tinggi, kemiringan berkisar 8 – 15%. Sedangkan untuk daerah yang merupakan perbukitan, kemiringan sangat terjal di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0 – 50%.

3. Sosial Budaya

Masyarakat Kabupaten Malinau tergolong heterogen karena terdiri dari berbagai etnis (suku) dengan aneka ragam budaya. Selain etnis mayoritas seperti: Lundayeh, Kenyah dan Tidung, juga terdapat etnis Jawa, Bugis, Toraja, Banjar, Bulungan dan lain sebagainya. Dengan keragaman etnis tersebut menjadikan Malinau memiliki potensi Wisata Budaya yang cukup menjanjikan.



BAB II

RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses penyelenggaraan pemerintahan, dengan rencana strategis yang rasional dan relevan maka pencapaian tujuan yang diinginkan pemerintah akan berjalan dengan hasil efektif dan efisien. Rencana strategis adalah salah satu alat untuk melakukan pengukuran setiap tindakan manajerial yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Penetapan Visi sebagai bagian dari rencana strategi yang merupakan langkah penting dalam suatu perjalanan suatu organisasi. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal sebagai salah satu unsur perangkat daerah Kabupaten Malinau selalu merujuk setiap gerak langkah dalam rencana strategisnya kepada VISI Kabupaten Malinau Tahun 2011 – 2016 yaitu : ***“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang aman, nyaman, dan damai melalui Gerakan Desa Membangun (Gerdema)”***

Berdasarkan dari VISI Kabupaten Malinau tersebut, maka Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Malinau menetapkan VISI sebagai Berikut ***“Terwujudnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan investasi dalam arti luas untuk kesejahteraan masyarakat melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA).”***

2. MISI

Untuk mewujudkan VISI yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran kedalam MISI Bagian Perekonomian dan penanaman Modal. MISI tersebut didasarkan pada salah satu MISI Kabupaten yang tertuang pada RPJM Kabupaten Malinau tahun 2011-2016 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah
3. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertempu pada ekonomi kerakyatan
4. Meningkatkan peran pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam perekonomian daerah.



Secara kongkrit upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan yang di lakukan dengan berbagai program yang bertujuan untuk memberdayakan potensi investasi dalam meningkatkan kemampuannya guna memanfaatkan peluang usaha. Sejalan dengan upaya tersebut, maka MISI Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal adalah :

1. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi investor dalam dan luar negeri untuk mempercepat proses pembangunan.
2. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat.
3. Memberikan pelayanan subsidi kepada masyarakat pedalaman dan perbatasan.
4. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait guna tercapainya program kerja yang sinergis.
5. Menyusun kebijakan dan mekanisme penanaman modal.

B. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

1. TUJUAN

Berdasarkan faktor kunci keberhasilan diatas, maka Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasikan dari pernyataan MISI yang telah ditetapkan maka tujuan yang ingin dicapai oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

- Adanya suasana yang kondusif bagi investor dalam dan luar negeri.
- Adanya interaksi positif antara Pemerintah Daerah dengan pihak Investor yang ada di daerah Kabupaten dan dengan daerah-daerah lain di luar Kabupaten Malinau (Public-Private Partneship).
- Mengurangi beban masyarakat pedalaman dan perbatasan dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dan biaya transportasi.
- Terciptanya kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan investor, BUMND dan BUMD.
- Meningkatkan pelayanan prima bagi pengembangan dunia usaha.
- Menarik minat investor dan penanaman modal (PMA dan PMDN).

2. SASARAN

Sebagai Tujuan aplikasi yang terukur dari Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setkab Malinau adalah sebagai berikut :

- Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) & Koperasi serta PMA dan PMDN.
- Tersedianya Buku potensi sumber daya daerah Kabupaten dalam bentuk Peta dan Profil investasi daerah Kabupaten.



- Tujuh Kecamatan daerah perbatasan Kecamatan Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Bahau Hulu, Sungai Boh dan Mentarang Hulu.
- Tersedianya pelatihan dan pendidikan sumber daya aparatur.
- UMKM, PMA dan PMDN
- Mengurangi tingkat pengangguran di daerah Kabupaten.

3. STRATEGI

Berdasarkan kebijakan yang telah digariskan dalam RPJM Kabupaten Malinau Tahun 2011 – 2016 maka arah kebijakan yang telah ditetapkan kepada Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal adalah :

1. Mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah investor.
2. Mempercepat peningkatan penanaman modal.
3. Memberi perlakuan yang sama bagi pelaku usaha, dan calon penanaman modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah.
4. Memberikan subsidi kepada masyarakat pedalaman untuk memenuhi kebutuhan pokok dan jasa angkutan udara.
5. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses perijinan sampai berakhirnya kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM

Berdasarkan Program SKPD, lintas SKPD yang telah ditentukan dalam RPJM Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016 maka program yang telah ditetapkan oleh Bagian Ekonomi Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kabupaten Malinau adalah :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
6. Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian/Perkebunan
7. Program peningkatan Pelayanan angkutan Daerah terisolir
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Migas



2. KEGIATAN

Berdasarkan program –program yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun, bersifat fleksibel berdasarkan kondisi objektif yang berkembang setiap tahun yaitu :

kondisi objektif yang berkembang setiap tahun yaitu :

1. Penyelenggaraan pameran investasi
2. Pengawasan kegiatan BUMD
3. Peningkatan angkutan daerah Pedalaman
4. Peningkatan Angkutan dari Kab. Ke Kota (Provinsi)
5. Peningkatan Pangan daerah terisolir
6. Peningkatan Pengawasan BBM
7. Peningkatan Pengawasan harga Sembako
8. Peningkatan Rakor PEPIDA
9. Peningkatan Penerbitan SKDP dan SKPP
10. Peningkatan Pengawasan Raskin
11. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Subsidi Penerbangan
12. Peningkatan Pemantauan Subsidi Ongkos Angkut
13. Penyusunan profil dan peta investasi PMA dan PMDN Kabupaten Malinau
14. Pendidikan dan pelatihan Tenaga Pengelola Ekonomi Kerakyatan
15. Studi banding ke BKPM Provinsi dan BKPM Pusat

Dari program dan kegiatan-kegiatan tersebut diatas maka sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Adanya jaminan keamanan bagi dunia usaha, seperti UMKM & Koperasi serta PMA dan PMDN.
2. Identifikasi potensi sumber daya daerah Kabupaten dalam bentuk Peta dan Profil investasi daerah Kabupaten.
3. terwujudnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan biaya transportasi udara ke daerah pedalaman dan perbatasan.
4. Peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan bagi pelaku UMKM & Koperasi.
5. Tersedianya lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dapat dilihat pada sejauh mana Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti pada tabel berikut :

Tabel 3
Ikhtisar Pencapaian Sasaran Tahun 2013

| NO | Program Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | | Ket |
|----|---|--|--|----------------------------------|-----|
| | | | Tolak Ukur | Target | |
| 1. | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Penyelenggaraan Pameran Investasi | Luar Kab. Malinau | Tersedianya Informasi Investasi | 2 Kali dlm 1 tahun | |
| 2. | Program Peningkatan dan Pengawasan BUMD - Pengawasan Kegiatan BUMD | PDAM dan PERUSDA | Terlaksananya pengawasan BUMD | 2 Kali dlm 1 tahun | |
| 3. | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi | PNS dan Masyarakat (Kec. Kayan Selatan dan Kayan Hulu) | Tersedianya buku dokumen profil investasi Daerah | 1 Dokumen | |
| 4. | Program peningkatan pelayanan angkutan daerah terisolir - Subsidi Penerbangan Perbatasan a. PT. Asi Pujiastuti Aviation b. Mission Aviation Fellowip (MAF) | Masyarakat Perbatasan | Terjangkaunya harga tiket | 7 Kecamatan | |
| 5. | Program Pembinaan dan Pengawasan Migas - Pengawasan BBM | APMS, Pangkalan, Pengeceer dan Masyarakat | Terlaksananya Pengawasan BBM | 1 Tahun | |
| 6. | Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor - Peningkatan Rakor Pepida | Hasil Export Kab. Malinau /Kota di Kaltim | Terlaksananya Rakor PEPIDA | 2 lokasi | |
| 7. | Program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah - Penerbitan SKDP dan SKPP | Badan Usaha/masyarakat | Terdaftarnya Semua Perusahaan | Jumlah SKDP dan SKPP yang terbit | |
| 8. | Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah. - Dana Pendamping Keg Subsidi Ongkos Angkut Sembako dan Subsidi Penerbangan | Masyarakat Pedalaman perbatasan | Terlaksananya Keg. Subsidi Ongkos Angkut Sembako dan Subsidi Penerbangan | 4 Kecamatan | |



| | | | | | |
|-----|--|---|---|--------------------------------------|--|
| 9. | Program pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat | Bagian Perekonomian dan penanaman Modal | Terlaksananya jasa surat menyurat | 1 Tahun | |
| 10. | Program Peningkatan Ketahanan pangan daerah terisolir - Subsidi Ongkos Angkut Khusus BBM | Masyarakat Kecamatan Sungai Boh dan Kayan Hilir | Terpenuhnya kebutuhan BBM untuk daerah pedalaman dan perbatasan | Kecamatan Sungai Boh dan Kayan Hilir | |
| 11. | Program pembinaan dan pengawasan migas - Pengawasan Penyaluran Tabung Gas 3 Kg akibat konversi minyak tanah | Agen dan pengecer LPG 3 Kg | Terlaksananya pengawasan LPG 3 Kg | 3 Kecamatan | |
| 12. | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Terisolir - Subsidi Ongkos Angkut Sembako | Masyarakat Pedalaman dan perbatasan | Terlaksananya penyaluran barang bersubsidi | 9 Kecamatan | |

B. ANALISIS STRATEGIS

1. ANALISIS LINGKUNGAN

Dari hasil pencermatan lingkungan yang telah dilakukan di lingkungan Bagian perekonomian, penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kabupaten Malinau melalui pencermatan (scanning) lingkungan internal organisasi, dapat dihasilkan kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknessess) sebagai berikut :

Kekuatan (Strengths) :

- SDM dengan tingkat pendidikan yang memadai
- Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta seluruh staf
- Tersedianya dana oprasional

Kelemahan (Weaknessess) :

- Kurangnya kesempatan aparatur mengikuti diklat pelayanan penanaman modal
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- Kurangnya komunikasi antar petugas dengan instansi terkait

Setelah dilakukan pencermatan lingkungan internal organisasi dilanjutkan pencermatan lingkungan eksternal serta diperoleh hasil Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) sebagai berikut :

Peluang (Opportunities) :

- Optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah
- Terbukanya kesempatan penanaman modal dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi
- Adanya program pemerintah yang mendukung



Ancaman (Threats) :

- Tuntutan masyarakat terhadap investor
- Kondisi geografis Kabupaten Malinau
- Kondisi perekonomian belum kondusif

Sebelumnya telah diketahui bahwa kinerja pencapaian sasaran masih belum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Hasil identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik analisa SWOT, adapun pengelompokan faktor internal dan eksternal dapat digambarkan sebagai berikut:

Faktor Internal

▪ **Kekuatan (Strengths) :**

| No. | Indikator | Potensi (%)*) | Skor (**) | Skor Tertimbang |
|---------------|--|---------------|-----------|-----------------|
| 1 | SDM Aparatur dengan tingkat pendidikan yang memadai | 25 | 4 | 1,00 |
| 2 | Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta seluruh staf | 25 | 3 | 0,75 |
| 3 | Adanya koordinasi dan kerjasama antara bagian | 25 | 2 | 0,50 |
| 4 | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang | 25 | 1 | 0,25 |
| Jumlah | | | | 2.50 |

Tabel 4

▪ **Kelemahan (Weaknessess) :**

| No. | Indikator | Potensi (%)*) | Skor (**) | Skor Tertimbang |
|---------------|---|---------------|-----------|-----------------|
| 1 | Kurangnya kesempatan SDM Aparatur mengikuti diklat Teknis tentang Penanaman Modal | 25 | 3 | 0,75 |
| 2 | Masih terbatasnya kemampuan SDM bidang teknis penanaman modal | 25 | 2 | 0,50 |
| 3 | Belum tersedianya data & profil Investasi Kabupaten Malinau | 30 | 4 | 1,20 |
| 4 | Belum tersedianya lembaga pelayanan Investasi | 20 | 2 | 0,40 |
| Jumlah | | | | 2.85 |



Tabel 5

Faktor Eksternal

▪ Peluang (Opportunities) :

| No. | Indikator | Potensi (%)*) | Skor (**) | Skor Tertimbang |
|---------------|---|---------------|-----------|-----------------|
| 1 | Adanya kebijakan dasar Penanaman Modal | 25 | 3 | 0,75 |
| 2 | Adanya peraturan-peraturan terkait guna mendorong usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 25 | 2 | 0,50 |
| 3 | Adanya kerjasama antara Pemerintah, dengan BUMN, BUMD, Swasta serta Masyarakat | 25 | 3 | 0,75 |
| 4 | Adanya kegiatan promosi Investasi | 25 | 4 | 1,00 |
| Jumlah | | | | 3,00 |

Tabel 6

▪ Ancaman (Threats) :

| No. | Indikator | Potensi (%)*) | Skor (**) | Skor Tertimbang |
|---------------|--|---------------|-----------|-----------------|
| 1 | Adanya persaingan ekonomi global | 40 | 3 | 1,20 |
| 2 | Adanya Bidang Usaha yang dinyatakan terbuka dan tertutup untuk investasi oleh Pemerintah | 30 | 3 | 0,09 |
| 3 | Kondisi infrastruktur yang tidak memadai | 10 | 2 | 0,20 |
| 4 | Ketidak stabilan sosial dan masalah keamanan Pusat dan Daerah | 20 | 3 | 0,60 |
| Jumlah | | | | 2,90 |

Tabel 7

2. HASIL ANALISIS

Setelah faktor internal dan eksternal diidentifikasi, maka selanjutnya dianalisis melalui matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi Bagian Perekonomian Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Setkab Malinau dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, Matrik ini dapat menghasilkan empat aset kemungkinan alternatif strategi antara lain adalah :



a. Strategi SO

Kekuatan yang dimiliki harus diberdayakan secara optimal untuk memanfaatkan peluang yang ada

b. Strategi ST

Kekuatan yang dimiliki harus senantiasa ditingkatkan untuk mengatasi segala macam ancaman

c. Strategi WO

Mengatasi segala kelemahan untuk mendapatkan memanfaatkan peluang yang ada

d. Strategi WT

Meminimalkan kelemahan untuk mengatasi segala ancaman

Pemanfaatan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal serta sinerginya yang menghasilkan sasaran strategis tersebut dituangkan dalam diagram Analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel. 8
Diagram Analisis SWOT

| | | |
|---|--|--|
| <p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p> | <p>Strength (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> SDM dengan tingkat pendidikan yang memadai. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta seluruh staf Adanya Koordinasi dan Kerjasama antar Bagian Tersedianya sarana dan prasarana penunjang | <p>Weaknesses (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kurangnya kesempatan SDM aparatur mengikuti diklat pelayanan Penanaman Modal Masih terbatasnya kemampuan SDM bidang teknis penanaman Modal Belum tersedianya data & profil investasi Kabupaten Malinau Belum tersedianya lembaga pelayanan Investasi |
| | <p>Opportuniitis (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya Kebijakan Dasar Penanaman Modal Adanya Peraturan - Peraturan terkait guna mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi Adanya kerjasama antara pemerintah, dengan BUMN, BUMD, swasta serta masyarakat Adanya Kegiatan promosi investasi | <p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalkan SDM yang ada dalam memberikan pelayanan kepada PMA dan PMDN Dukungan pimpinan serta seluruh staf merupakan langkah awal untuk mengimplementasikan dan meningkatkan standar playanan prima guna menarik investor untuk pemanfaatan potensi daerah |
| <p>Treath (Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya persaingan ekonomi global Adanya bidang usaha yang dinyatakan terbuka dan tertutup untuk investasi oleh pemerintah Kondisi infrastruktur yang | <p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalkan SDM yang ada untuk mengkoordinir dan memfasilitasi penyelesaian tuntutan masyarakat terhadap investor Manfaatkan dukungan dan | <p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkatkan kesempatan mengikuti diklat bagi aparatur untuk menghadapi tuntutan masyarakat terhadap investor Tingkatkan penyediaan data yang akurat dan fasilitasi sarana dan |



| | | |
|---|---|---|
| 4. tidak memadai Ketidak stabilan sosial dan masalah keamanan pusat dan daerah | komitmen pimpinan dan semua staf untuk menghadapi tantangan kondisi geografis | prasarana yang memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat |
|---|---|---|



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI nomor 239/9/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Secara umum Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal pada tahun 2013 telah dapat mencapai sebagian besar dari yang ditetapkan untuk tahun 2013. Namun ada beberapa Sasaran yang masih perlu ditingkatkan lagi.

Dengan LAKIP Bagian Perekonomian Modal dan Penanaman Modal Setkab. Malinau Tahun 2013 ini diharapkan dapat memacu kinerja pemerintahan Kabupaten Malinau.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 selesai disusun.

Dalam penyusunan Laporan LAKIP SKPD Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna perbaikan dan kesempurnaan laporan yang akan datang.

Pada kesempatan ini, tidak lupa disampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu meluangkan waktu dan pikirannya untuk menyelesaikan laporan ini.

Semoga Laporan LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Kabupaten Malinau Tahun 2013 dapat memberikan manfaat yang berguna bagi yang membutuhkan.

**KABAG. PEREKONOMIAN DAN
PENANAMAN MODAL,**

TIRUSEL STP, SE, M.Si
NIP. 19620409 200003 1 002



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman Judul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| | |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Dasar Pembentukan Organisasi..... | 1 |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi | 1 |
| C. Struktur Organisasi..... | 2 |
| D. Sumber Daya Manusia..... | 3 |
| E. Sarana dan Prasarana..... | 5 |
| F. Keadaan Umum dan Wilayah | 5 |
| | |
| II. RENCANA STRATEGIS | 7 |
| A. Visi dan Misi..... | 7 |
| B. Tujuan, Sasaran. Dan Strategi. | 8 |
| C. Program dan Kegiatan | 9 |
| | |
| III. AKUNTABILITAS KINERJA | 11 |
| A. Evaluasi Kinerja | 11 |
| B. Analisis Strategis..... | 12 |
| | |
| IV. PENUTUP | 17 |
| | |
| LAMPIRAN | |



LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA (PK)

SKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN : 2014

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN |
|----|---|--|--------------------|--|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya kegiatan surat menyurat | 100 kali (1 tahun) | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5,000,000 |
| 2 | Pelaksanaan Pengawasan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi | Tersedianya BBM dan harga BBM yang stabil | 6 Kecamatan | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan BBM | 250,000,000 |
| 3 | Ketersediannya BBM di Daerah Pedalaman/Perbatasan yang relatif murah | Terpenuhinya kebutuhan BBM untuk masyarakat Pedalaman/Perbatasan | 4 Kecamatan | Program Pembinaan dan Pengawasan Migas Subsidi Ongkos Angkut BBM | 2,000,000,000 |
| 4 | Pemantauan Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Ongkos Angkut Khusus BBM Pedalaman/Perbatasan | Terlaksananya kegiatan Subsidi Ongkos Angkut BBM Pedalaman/Perbatasan | 4 Kecamatan | Pendamping Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Khusus BBM | 100,000,000 |
| 5 | Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan BUMD | Terlaksananya Pengawasan BUMD | 2 Kali | Program Pembinaan dan Pengawasan BUMD dan BUMN Pengawasan Kegiatan BUMD | 35,000,000 |
| 6 | Terlaksananya Penerbitan SKDP dan SKPP | SKDP dan SKPP yang terbit | 400 Lembar | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Penerbitan SKDP dan SKPP | 20,000,000 |
| 7 | Mengikuti Rakor PEPIDA | Terlaksananya Rakor PEPIDA | 2 Lokasi | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Rakor PEPIDA | 50,000,000 |
| 8 | Ketersediannya Sembako di Daerah Pedalaman/Perbatasan yang relatif murah | Terpenuhinya Kebutuhan Pokok di Daerah Pedalaman/ Perbatasan dengan harga terjangkau | 12 Kecamatan | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Terisolir Subsidi Ongkos Angkut Sembako | 7,000,000,000 |
| 9 | Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Sembako | Terlaksananya kegiatan Subsidi Ongkos Angkut dengan tepat sasaran | 12 Kecamatan | Pendamping Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Sembako | 200,000,000 |

